

# Berita Lingkungan Hidup

## KONFERENSI KOPENHAGEN

### Mekanisme Pembangunan Bersih

Harian Kompas, 30 Agustus lalu, memuat gambar aksi yang dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, dalam rangka menyongsong konferensi perubahan iklim di Kopenhagen, Desember 2009. Konferensi tersebut memiliki arti strategis dalam menentukan kelanjutan Protokol Kyoto yang berakhir pada 2012. Edi Saputra

Aksi mengingatkan dari aktivis lingkungan tersebut dapat dimengerti. Seperti kita lihat di berbagai media, pro dan kontra mengenai konsep pakta iklim yang baru telah mengemuka menjelang konferensi. Kekhawatiran pihak-pihak negara maju bahwa kewajiban pembatasan emisi berpotensi menghambat perkembangan ekonomi mereka masih juga tampak. Hal ini terlihat dari kurang mulusnya proses pengesahan legislasi perubahan iklim di Amerika Serikat dan Australia.

Isu lain yang masih membayangi adalah tarik ulur mengenai besarnya kewajiban pengurangan emisi untuk setiap negara. Kita masih ingat posisi China dan India pada Bali Roadmap di Nusa Dua, Desember 2007 lalu, yang menolak pembatasan emisi bagi negaranya karena berisiko menghambat kemajuan ekonominya yang tengah berkembang pesat. Isu-isu di atas menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak akan nasib pakta iklim yang baru.

Terkait isu di atas, Protokol Kyoto sudah menawarkan jalan tengah melalui instrumen Clean Development Mechanism (CDM) dan Certified Emission Reduction (CER) yang memberikan fleksibilitas bagi negara maju (credit buyer) dengan membeli karbon dari proyek pengurangan emisi di negara

berkembang sehingga beban dapat dibagi. Hasil pengurangan emisi selanjutnya dapat diperhitungkan, baik sebagai pengurang emisi di negara berkembang maupun di negara credit buyer (UNFCCC, 2008).

Anggapan bahwa mekanisme ini kemudian akan menghambat pembangunan di negara berkembang tidak beralasan mengingat di bawah Protokol Kyoto negara berkembang belum diwajibkan membatasi emisinya sehingga keikutsertaan dalam program CDM bersifat sukarela sehingga bersifat dukungan dan insentif bagi pembangunan yang prolingkungan.

#### Potensi bagi Indonesia

Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004 dan perannya dalam CDM tampak dalam bentuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon yang beragam. Daftar Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan adanya proyek-proyek, seperti pemanfaatan energi surya, biomassa, gas metana, co-generation, dan panas bumi yang telah teregistrasi di UNFCCC. Keberhasilan proyek-proyek itu patut dihargai. Di sisi lain partisipasi Indonesia perlu ditingkatkan, baik dari segi jumlah proyek maupun reduksi emisi karbon secara total.

Terlepas dari pro-kontra yang mengemuka, hal tak kalah penting adalah bagaimana Indonesia dapat mengambil manfaat optimal dari skema yang ada. Instrumen tersebut memberikan manfaat dalam bentuk kesempatan dan dukungan untuk berperan aktif dalam program pengurangan emisi CO dan gas rumah kaca lainnya yang dampaknya dirasakan seluruh dunia dalam bentuk peningkatan suhu global, perubahan iklim, dan kualitas udara yang menurun.



Manfaat lainnya adalah dalam bentuk kerja sama dan transfer teknologi dari negara lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan. Dengan posisi Indonesia sebagai net oil importer saat ini, energi terbarukan perlu terus dikembangkan untuk mengamankan ketersediaan energi masa depan. Hal ini sangat sejalan dengan rencana energi jangka panjang Indonesia, seperti digariskan dalam UU Energi 2007. Sumber panas bumi, misalnya, peranannya akan terus meningkat mengingat pemanfaatannya yang, menurut data Departemen ESDM, baru sekitar 5% dari potensi total.

Manfaat finansial dari skema CER dalam bentuk komoditas carbon credit juga merupakan hal yang nyata. Contoh terbaru dari proyek di Indonesia yang mendapatkan CER adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 110 MW Darajat III di Jawa Barat pada Juni lalu.

Dengan didapatnya CER, pengurangan emisi karbon dapat dikomersialkan dalam pasar karbon internasional. Carbon credit didapat dari proyek di atas 650.000 ton CO ekuivalen per tahun (UNFCCC, 2009). Jumlah ini kira-kira setara dengan emisi karbon yang dilepaskan 6,5 juta buah mobil yang masing-masing menempuh jarak 350 kilometer. Dengan harga karbon kuartal terakhir 13 euro-15 euro di bursa saham London, potensi pendapatan tambahan per tahun 12 juta-14 juta dollar AS. Nilai ini cukup signifikan, sekitar 15%-20% dari biaya pembangkit per kwh. Secara tidak langsung, insentif tersebut akan menggeser perhitungan keekonomisan proyek-proyek agar menjadi lebih menarik dan pada akhirnya dapat menguntungkan konsumen luas dalam bentuk peningkatan ketersediaan energi dan harga akhir yang lebih kompetitif.

Insentif carbon credit di atas tentunya sangat relevan di tengah program pengembangan energi terbarukan saat ini. Insentif-insentif semacam ini diperlukan energi-energi terbarukan untuk bisa bersaing dengan

bahan bakar minyak dan gas, yang saat ini dikonsumsi masyarakat secara luas.

Pemerintah perlu melengkapi insentif di atas dengan terus mendukung dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi bagi para pemain industri, fasilitasi dengan credit buyer, kemudahan perizinan proyek, dan peraturan yang lebih jelas, baik di pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan proyek-proyek Indonesia dalam program tersebut.

Memang harus diakui bahwa proses pengajuan, validasi, verifikasi, sampai dikeluarkannya CER masih perlu dibenahi. Seperti diakui oleh UNFCCC, prosedurnya masih perlu ditingkatkan dan isu additionality masih menjadi masalah bagi partisipan.

Proyek panas bumi di atas, misalnya, butuh waktu sekitar 3 tahun dari proses validasi sampai keluar CER. Konsep additionality mensyaratkan adanya proyek-proyek baru yang dapat menunjukkan pengurangan emisi karbon jika dibandingkan dengan tidak adanya proyek tersebut (UNFCCC, 2009). Tambahan lagi, prosedur verifikasi sebagai syarat komersialisasi CER butuh pembangkit untuk beroperasi dan menghasilkan pengurangan emisi secara nyata sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Dalam perjalanannya diharapkan prosesnya menjadi lebih sederhana.

Program CDM masih terus berjalan sampai tahun 2012 dan setelah tahun 2012 jika kesepakatan dicapai. Kita tunggu saja bagaimana hasil pertemuan Copenhagen, Desember nanti.